

## DAFTAR PUSTAKA

### 1.1. Buku

- Ali, H. Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta,
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Makalah dalam Penataran Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Seri Hukum Hak Kekayaan: Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

## 1.2. Jurnal/Artikel/Tesis

- I Putu Arwan Puspa R, 2018, “Implikasi Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Komputerisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Susanto, “Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2017.

Wening Indradi, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hak Tanggungan Bukan Debitor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PDT/2013/PTY Dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 58/PDT.G/2012/PN.Yk)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **1.3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.